

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN TENAGA KERJA
NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

ABSTRAK

Raiha Natu Qalbi. H, 2210843026, Implementasi Kebijakan Penataan Tenaga Kerja Non ASN Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2026. Dibimbing oleh : Kusdarini, S.IP, M.PA dan Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA. Skripsi ini terdiri dari 138 Halaman dengan referensi 7 buku, 12 jurnal, 1 skripsi, dan 4 Peraturan/dokumen resmi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penataan Tenaga Kerja Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah tenaga Non ASN atau tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang mencapai 1.548 orang, sementara kejelasan status kepegawaian mereka masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Kebijakan penataan Non ASN yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian bagi seluruh tenaga honorer melalui mekanisme seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai implementasi kebijakan ini untuk menilai sejauh mana pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis. Teori ini mencakup empat variabel yang dianalisis, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penataan tenaga kerja Non ASN di Kota Bukittinggi secara umum telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Pada variabel komunikasi dan struktur birokrasi, mekanisme formal sudah berjalan namun belum menjangkau substansi yang dibutuhkan kelompok sasaran. Pada variabel sumber daya, jumlah staf dan ketersediaan kuota formasi masih terbatas. Pada variabel disposisi, komitmen kelembagaan sudah baik namun belum didukung insentif yang memadai bagi pelaksana. Meskipun demikian, per tahun 2026 seluruh tenaga Non ASN yang mendaftar telah berhasil diangkat melalui skema PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penataan Non ASN, PPPK, Kota Bukittinggi.

ABSTRACT

Raiha Natu Qalbi. H, 2210843026, Implementation of the Management of Non Civil Service Employees in the Bukittinggi City Government, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, 2026. Advised by: Kusdarini, S.IP, M.PA, and Ilham Aldelano Azre, S.IP, MA. This thesis consists of 138 pages and cites 7 books, 12 journal articles, 1 thesis, and 4 regulations or official documents.

This study aims to analyze the implementation of workforce restructuring for non-ASN personnel within the Bukittinggi City Government. The study was prompted by the high number of Non ASN personnel or contract workers employed by the Bukittinggi City Government, which stands at 1,548, while the clarity of their employment status has yet to be fully established. The policy on the restructuring of Non ASN personnel, based on Law No. 20 of 2023 on the Civil Service, is the government's effort to provide certainty regarding the employment status of all contract workers through the selection mechanism for Full-Time Government Employees with Work Agreements (PPPK) and Part Time Government Employees with Work Agreements (PPPK). Therefore, it is important to conduct a study on the implementation of this policy to assess the extent to which it is being carried out in accordance with its stated objectives.

This study employs a descriptive qualitative approach, using George C. Edwards III's theory of policy implementation as its analytical framework. This theory encompasses four variables analyzed in this study: communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. Data collection techniques included in interviews and documentation.

The results indicate that the implementation of workforce restructuring for non-civil servants in Bukittinggi City has generally been underway but is not yet fully optimal. Regarding the variables of communication and bureaucratic structure, formal mechanisms are in place but have not yet addressed the substantive needs of the target group. Regarding the resource variable, the number of staff and the availability of staffing quotas remain limited. Regarding the disposition variable, institutional commitment is strong but is not yet supported by adequate incentives for implementers. Nevertheless, as of 2026, all Non ASN personnel who applied have been successfully appointed through either the Full-Time PPPK or Part Time PPPK schemes.

Keywords : Policy Implementation, Non Civil Servant Management, PPPK, Bukittinggi City.